



Pro Kontra Pembentukan Densus Tipikor

H Subhan Nur: Densus Tipikor Belum Perlu Dibentuk



Christiandy Sanjaya

PONTIANAK-RK. Komisi I DPRD Provinsi Kalbar tidak setuju ihwal rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor oleh Mabes Polri. Sebagai upaya pemberantasan dan penanganan korupsi di Indonesia.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, H Subhan Nur ber-

pendapat, belum perlu membentuk Densus Tipikor. Pasalnya tugas dan fungsi Densus Tipikor dinilai masih belum jelas. Dengan membentuk Densus Tipikor tentu harus jelas tindakannya nanti seperti apa.

"KPK yang gajinya sudah lumayan masih juga ada perbaikan-perbaikan. Kita tetap mendukung perbaikan yang dilakukan KPK dan harus disupport," tegas H Subhan Nur, Minggu (22/10).

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM mendukung ihwal pembentukan Densus Tipikor sebagai upaya pemberantasan dan penanganan korupsi di Indonesia.

Bahkan, Wagub menyambut baik wacana Kapolri Jen-

deral Pol Tito Karnavian ihwal pembentukan Densus Tipikor. "Niat semuanya, baik KPK, BPK dan BPKP ingin ada transparansi dalam pengelolaan uang rakyat. Mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun APBDes," ulasnya.

Tak hanya KPK, BPK dan BPKP, Wagub menambahkan, semua pihak tentu menginginkan pengelolaan keuangan negara secara tertib. Yakni, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

"Yang jelas, kita ingin semua dikelola dengan baik dan tidak mengakibatkan kerugian negara. Pengawasan korupsi,



H Subhan Nur

baik KPK atau Polri melalui Densus Tipikor nantinya, saya kira tidak ada masalah. Bagi kita yang penting pengelolaan keuangan itu dilakukan secara baik," ucap Wagub Christiandy Sanjaya.

**Reporter: Zainudin
Redaktur: Andry Soe**